

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK. CABANG WAMENA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Publik (S1)*



Oleh :
SUCI
NIM. 2016 11185

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATENJAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM) YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG WAMENA**

Identitas Penulis,

NAMA : SUCI
NIM : 2016 11185
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

SOLTAN TAKDIR, ST., M.Si
NIDN.1214018301

ABIRU AGUSTINA SURABUT,S.IP.,M.Si
NIDN.1419089102

Mengetahui :
Ketua Program Studi,

H. MUHAMMAD ALI,S.Sos.,M.Si
NIDN.1417056701

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG WAMENA

Telah Dipertahankan Skripsi Ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi Pada Hari, Tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua

Sekretaris

(.....)
NIDN.

(.....)
NIDN.

Anggota

Anggota

(.....)
NIDN.

(.....)
NIDN.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

H.MUHAMMAD ALI, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1417056701

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahuwata'ala yang menjadi sumber dari segala kekuatan atas berkat rahmat yang senantiasa tercurahkan sehingga penulis dapat termotivasi dan terbimbing untuk merampungkan skripsi dengan baik dan lancar. Teriring salam dan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Insan Kamil yang menjadi suri tauladan terbaik ummat manusia atas misi yang diembannya yang mampu merubah zaman yang penuh dengan kejumudan pengetahuan menjadi zaman yang terang dengan ilmu pengetahuan.

Akhirnya dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah berkontribusi atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Soltan Takdir, ST.,M.Si Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis selama proses penelitian dengan ikhlas;
2. Ibu Abiru Agustina Surabut, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis;
3. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan studi;
4. Bapak H. Muhammad Ali, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan studi akhir;
5. Ibu Dewi Merdekawati selaku Branch Operational Managger yang telah memfasilitasi peneliti selama proses penelitian;

6. Bapak Damarjati Satya Gumelar selaku Mikro Banking Manager yang juga telah memfasilitasi peneliti selama proses penelitian;
7. Seluruh Informan Penelitian, Ibu Kasmiati, Bapak H. Masse, Ibu Vera, Ibu Sadariana Nababan, Ibu Roniati Hutapea yang telah bersedia diwawancarai;
8. Orang tua tercinta Ayahanda Rahmani dan Ibu terkasih Indo upe yang telah menjadi motivasi dan inspirasi bagi penulis dan yang telah mendoakan penulis;
9. Kakak-kakak, Kak Nurhawan, Kak Amirudin, Desi Ratnasari, Rusdiansyah yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jayapura Komisariat Wamena , Abang/Caca/Adinda yang telah memberikan warna selama proses studi maupun selama proses penelitian;

Semoga dengan bantuan dan sumbangsih yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal saleh dan mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahuwata'ala. Terlebih semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya serta bagi adik-adik saya yang masih berjuang pada Univeristas Amal Ilmiah Yapis Wamena khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

Demikian sekapur sirih yang dapat disampaikan, atas segala sumbangsih yang diberikan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wamena, 14 Agustus 2020
Penulis,

SUCI
NIM. 2016-11-185

ABSTRAKSI

Suci, NIM : 2016-11-185, Judul *Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena*” , Dosen pembimbing I Bapak **Soltan Takdir, ST.,M.Si** dan Ibu **Abiru Agustina Surabut, S.IP.,M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan menteri Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teori yang digunakan untuk mengukur Implementasi adalah teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Implmentasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari program KUR sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian Sumber Daya Manusia sudah sesuai dengan kompetensi dan memahami program KUR, Sumber Daya Finansial yang cukup dan dialokasikan sesuai dengan permintaan nasabah, Pegawai sudah mempunyai komitmen terhadap waktu, disiplin dan jujur serta selalu pro aktif memberikan solusi apabila nasabah mempunyai keluhan, kemudian implementasi sudah sesuai dengan peraturan menko perekonomian nomor 8 tahun 2019, struktur birokrasi yang efektif dan memudahkan masyarakat mengurus Kredit Usaha Rakyat

Kata Kunci : *Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II. LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Teori	10
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Definisi Operasional	33
D. Alur Pikir Penelitian	35
BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Sampel Sumber Data	36
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisa Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A Hasil Penelitian	42
1. Keadaan Lokasi Penelitian	42
a. Sejarah	42
b. Letak Geografis	42
c. Struktur Organisasi	43
d. Tugas Pokok dan Fungsi	44
e. Sumber Daya Manusia	53
2. Keadaan Informan	55
3. Analisis Data	56
B. Pembahasan	68
BAB V. PENUTUP	

A	Kesimpulan	73
B	Saran	73
Daftar Pustaka	74
Kuesioner Penelitian		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat yakni melalui pemberian modal kepada usaha kecil maupun besar. Kredit merupakan modal yang diberikan bank dan sebagai alat yang dapat memperlancar dan merangsang sebuah usaha agar bisa menjadi lebih besar.

Secara teoritis, lembaga perbankan adalah lembaga yang menghimpun dana serta menyalurkan kepada masyarakat melalui pemberian kredit yang *nota bene* dapat mendukung pembiayaan usaha secara formal. Bank mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang menyediakan pembiayaan seperti KUR kepada para nasabah yang berkecimpung di dunia usaha maupun tidak.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK atau koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*. Secara umum, tujuan KUR adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, serta menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Nasabah sebenarnya masih bingung bagaimana memperoleh KUR.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja yang luas dan memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Tahun 2012 UMKM menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% dari total lapangan kerja, dan menyumbang sekitar

56,5% pembentukan PDB Indonesia. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada Tahun 2009 tercatat sebanyak 52,8 juta unit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 96,2 juta orang. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, dimana pada Tahun 2013 jumlah UMKM bertambah menjadi 57,9 juta unit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 114,1 juta orang. (Kemenko Perekonomian, 2015). Kondisi perkembangan jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja yang terlibat tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain adalah peningkatan akses pembiayaan UMKM. Salah satu kebijakan yang dikururkan sejak November 2007 adalah program peningkatan akses pembiayaan UMKM kepada Perbankan dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam perkembangannya sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,85 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk Tahun 2014, jumlah KUR yang disalurkan sebesar Rp.40,2 triliun kepada 2,4 juta debitur. Pada Tahun 2015 kebijakan/program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp.30 triliun.

Seiring dengan kebijakan tersebut pemerintah sekarang ini menetapkan arah kebijakan di bidang UMKM yaitu meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi yang dilaksanakan adalah : (1) peningkatan kualitas SDM, (2) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, (3) peningkatan

nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, (4) penguatan lembaga usaha, dan (5) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha (Kemenko Perekonomian, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Sejak dikururkan kebijakan/ program KUR, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena ditunjuk sebagai salah satu Bank Pelaksana. Salah satu KUR yang dilaksanakan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena adalah KUR Mikro.

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta. KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan terkait, yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin (Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2019). Untuk pelaksanaan kebijakan KUR Mikro, maka pihak BRI menetapkan standard operating procedures (SOP) pelayanan KUR Mikro pada unit-unit BRI, yang meliputi : (1) prosedur permohonan kredit, (2) prosedur analisa kredit, (3) prosedur pencairan kredit, dan (4) prosedur pencatatan kredit.

Berdasarkan studi pendahuluan (prasurevei) yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan KUR Mikro ini pada Bank Pelaksana.

Dari wawancara awal dengan beberapa pelaku usaha mikro calon debitur dan debitur KUR Mikro, ada beberapa hal yang dikeluhkan berkenaan dengan implementasi KUR Mikro, yaitu : (1) Banyak pelaku usaha mikro tidak mengetahui adanya KUR Mikro dan kurang paham bagaimana mengurus/ memperoleh KUR Mikro, karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari unsur-unsur pelaksana kebijakan terutama dari instansi Pemerintah Daerah terkait dan Bank Pelaksana. (2) Persyaratan administrasi memperoleh KUR yang ditetapkan oleh pemerintah masih dianggap sulit dan berat untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro calon debitur, terutama syarat izin usaha mikro dari pemerintah daerah, dan persyaratan tambahan lainnya dari pihak Bank Pelaksana; (3) Proses dan realisasi kredit pada Bank Pelaksana tidak tepat waktu sesuai yang dibutuhkan calon debitur; (4) Realisasi besar kredit yang disetujui pihak Bank seringkali tidak sesuai dengan besar kredit yang dibutuhkan calon debitur, sehingga ada calon debitur yang membatalkan permohonan kreditnya.

Di lain pihak menurut pengakuan pihak Bank Pelaksana, pemohon KUR Mikro sebenarnya cukup banyak, namun tidak semua dapat dikabulkan/dipenuhi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR Mikro sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019, ataupun persyaratan administrasi tertentu yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9 10), implementasi kebijakan

diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dandipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empatfaktor tersebut merupakan kriteria yangperlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Faktor *pertama* adalah Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan sehingga perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksaan dilapangan.

Faktor *kedua* adalah Sumber daya. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Kedua adalah Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga adalah Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dan yang keempat dari faktor sumber daya adalah fasilitas dimana fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Faktor *ketiga* Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik yang terdiri dari: a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. b. Insentif, untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Faktor *keempat* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Struktur Birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para

pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan membuat sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul ***Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019***

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena dengan indikator yang diteliti yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi (George C Edward III).

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni sejauhmana Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan (Sugiyono, 2006 : 200), dengan demikian dicapainya tujuan di atas diharapkan dapat berguna untuk:

a. Kegunaan Teoritis.-

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu untuk memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ilmu administrasi

publik di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena khususnya di bidang pelayanan.

b. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena dan bagi pihak lain hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang berkaitan dengan masalah yang sama yang penulis angkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut **Susilo (2007:174)** implementasi merupakan suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap. Menurut **Dunn (2003:132)** implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. **Dunn** mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutkannya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat baik negatif maupun positif. Dengan demikian program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, antara lain :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dengan adanya program ini maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat dari program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan tanpa memberikan manfaat ke dalam masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dilaksanakan.

Berhasil atau tidaknya suatu program implementasi tergantung dari unsur pelaksanaannya. Implementasi memiliki arti penting baik didalam organisasi maupun perorangan karena implementasi bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program kebijakan yang telah direkomendasikan bukan jaminan untuk dipilih. Kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana, agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

2. Pengertian Kebijakan

Menurut Solly (2007:9) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Friedrich (2007:20) bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan secara umum menurut Sid Zainal Abidin (2006:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undangundang.
- 3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi atau tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Abidin (2006:22) mengemukakan kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arrah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Selain itu Subarsono (2005:17) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Jika dilihat definisi diatas, maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa :

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah).
- b. Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik atau buruknya dampak yang ditimbulkan.
- c. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- d. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

4. Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik

Anderson (2006:41) menyatakan sekalipun tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Adapun ciri tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Public policy is purposive, goal oriented behavior rather than random or change behavior.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya, artinya : pembuatan suatu kebijakan tidak boleh asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
- b) *Public policy consist of course of action rather than separate discrete decision or action performed by government officials.* Maksudnya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegak hukum.
- c) *Policy is what government do not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
- d) *Public policy maybe either negative or positive.* Kebijakan dapat dibentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e) *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuinya.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) bahwa implementasi kebijakan publik adalah pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah Undang-Undang Legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelurusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Meter dan Horn (2011:49) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Sedangkan menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang topdown, maksudnya menurunkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

6. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dibawah ini akan dipaparkan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh keempat ahli dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan.

a) Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *a model of the policy implementation*. proses implementasi ini merupakan sebuah atraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. ada enam variabel, menurut van metter dan van horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari

kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah bersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh van

matter dan van horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut karena memang ketiganya tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain

3) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/kecenderungan (*disposition*)

Para pelaksana sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor

laksanakan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van metter dan van horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b) Model Daniel Mazmian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmian dan Paul Sabatier. model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *a framework for policy implementation analysis*. kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada

keseluruhan proses implementasi. dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. di samping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administratur atau birokrat) di lapangan.

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya

akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

- d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

- a) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksanaan akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c) Ketetapan alokasi sumber dana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga lembaga atau instansi-instansi pelaksana

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

- f) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena *topdown policy*

bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

g) Akses formal pihak-pihak luar

faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi par aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

a) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi dan tekknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu ebijakan publik.

b) Dukungan publik

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

- c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.
- d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

c) Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang

diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

d) Model George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Definisi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

b. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Ada beberapa landasan yang digunakan dalam implementasi KUR, antara lain:

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia

Kredit Usaha Rakyat dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang dari segi akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kredit Usaha Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, dengan isi sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden, Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- b) Dalam rangka melaksanakan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a, telah ditetapkan. Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2005 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.

3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

c. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan Kredit Usaha Kredit (KUR) menurut Aidil (2014) adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akses pembiayaan UMKM & K pada bank;
- 2) Pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang *bankable* (nasabah yang memenuhi syarat bank) sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (sebagai embrio debitur komersial); dan
- 3) Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

d. Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat dimanfaatkan untuk:

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Modal

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan usaha kecil untuk mendapatkan biaya sebagai modal dasar, maupun untuk langkah – langkah pengembangan usahanya, yaitu melalui kredit perbankan; dan

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Komsumtif

Kredit komsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau konsumsi pribadi.

Kredit Usaha Rakyat dapat dimanfaatkan sebagai:

1) Modal. Ada beberapa alternatif yang dilakukan usaha kecil untuk mendapatkan biaya sebagai modal dasar atau langkah dalam mengembangkan usahanya, seperti: kredit perbankan; dan

2) Komsumtif. Kredit komsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau konsumsi pribadi.

e. Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penerima KUR diatur dalam Pasal 3 Permenko No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:

- 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 2) Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja diluar Negeri;
- 3) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia;

- 4) Tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
dan
- 5) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

2. Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kebijakan pelaksanaan KUR sudah ada sejak 2015 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dengan pokok – pokok kebijakan sebagai berikut:

- a. KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan yang terkait, yang produktif, dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan bank pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 25 Juta yang dipinjam oleh perusahaan peminjam;
- b. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); datau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 Juta;
- c. KUR Mikro diberikan kepada yang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - 1) Calon debitur mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan oleh bank pelaksana;
 - 2) Calon debitur dapat sedang menerima kredit/pembiayaan, seperti: kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan

bermotor, kartu kredit, serta KUR Mikro dengan kolektabilitas lancar;

- 3) Calon debitur memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan syarat ujian lainnya;
 - 4) Calon debitur yang sedang menerima KUR Mikro diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp. 25. Juta; dan
 - 5) Setiap debitur hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp. 75 Juta per debitur dari bank pelaksana KUR.
- d. Agunan KUR Mikro, antara lain:
- 1) Jangka waktu KUR Mikro maksimal 3 Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 5 Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; dan
 - 2) Perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada debitur yang usahanya meningkat atau memerlukan tambahan kredit/pembiayaan tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp. 75 Juta.
- e. Sektor yang dibiayai KUR Mikro adalah:
- 1) Seluruh bidang usaha mikro sector pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - 2) Seluruh bidang usaha mikro di sector perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan;

- 3) Seluruh bidang usaha mikro sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan; dan
- 4) Seluruh bidang usaha mikro di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.

Ada tiga pilar pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni:

- a. **Pemerintah.** Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Lautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UMKM, yang berfungsi untuk membantu mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit;
- b. **Lembaga.** Lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan; dan
- c. **Perbankan.** Perbankan sebagai penerima jaminan yang berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan koperasi.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Reverensi
1	Muhamad Nadratuzzaman Hosen	Analisis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Nusantara Depok	- Estimasi biaya transaksi dalam proses mendapatkan KUR BSM KCP Nusantara Depok, dalam sebuah <i>case</i> seorang nasabah harus meneluarkan dana sebesar 14.168% dari limit dana KUR sebelum memperoleh dana; - Kendala yang dihadapi adalah karena BSM Nusantara berkompetisi dengan BRI dalam memperoleh <i>market</i>	Jurnal ekonomi Islam, Volume 4 Nomor 2, 2013 Halaman 155 – 171

			<i>share</i> di wilayahnya, dan masyarakat sibuk dengan usahanya dan tidak sempat melihat sosialisasi KUR di media massa.	
2	I Gusti Agung Alit Semara Putra dan I. A. Nyoman Saskara	Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar	Efektivitas pelaksanaan Program Bantuan KUR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Denpasar gajah Mada di Kota Denpasar menunjukkan hasil yang efektif, berdamoak positif terhadap pendapatan UMKM, dan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi UMKM.	<i>e-Jurnal</i> ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana, Volume 2, Nomor 2, 2013 Halaman 457 – 468
3	Rahmawati S.	Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank BRI Unit Malino Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Malino	Faktor modal memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan usaha	Skripsi, Ilmu Ekonomi (SE), Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Alauddin Makassar, 2018

C. Definisi Operasional

Menurut **Sugiyono(2014)** definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi

pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variabel/variabel mandiri yaitu Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga secara operasionalnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Wamena yang dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Untuk mengukur variabel Implementasi Kebijakan, maka digunakan indikator-indikator sebagai berikut :

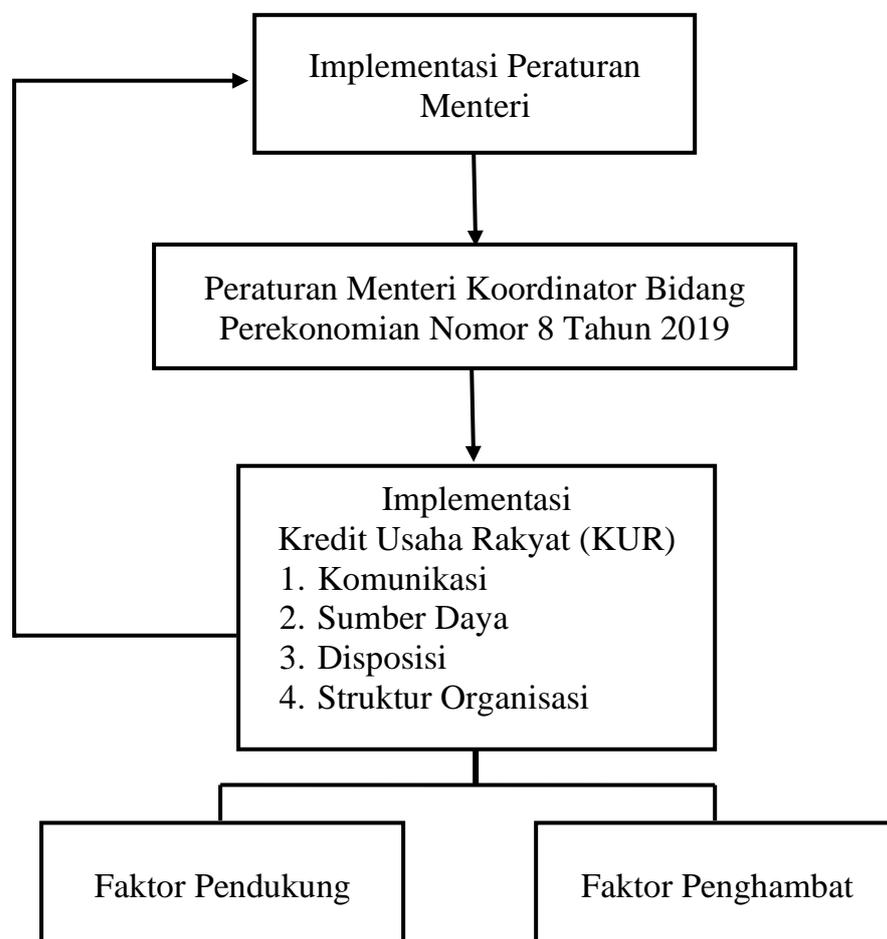
- a) Komunikasi, yaitu penyampaian informasi/sosialisasi, metode yang digunakan dan intensitas komunikasi tentang Kredit Usaha Rakyat dari implmentator kepada nasabah.
- b) Sumberdaya
 1. Tersediaanya implementor yang sesuai dengan kompetensi dilihat dari tingkat pendidikan, pemahaman terhadap program dan kemampuan menyampaikan program KUR.
 2. Tersediaanya dana yang sesuai dengan permintaan nasabah dan alokasi dana yang diberikan dari pihak penyalur kepada penerima KUR.
- c) Disposisi, yaitu profesionalisme Implementator yang dilihat dari komitmen terhadap waktu, jujur, dan proses sharing dengan kelompok sasaran/mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi nasabah.
- d) Struktur Birokrasi :
 1. Standard Operasional Prosedur yaitu kesesuaian aturan/prosedur yang diberlakukan oleh Bank kepada Nasabah

dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyaluran KUR.

2. Struktur organisasi yaitu rentang kendali antara pimpinan dan bawahan pada Unit Mikro Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Wamena dalam melaksanakan program KUR.

D. Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian



Sumber : Penalaran Penulis, 2020

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian dilaksanakan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian dilakukan selama ± 1 (satu) bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian menggunakan pendekatan deskriptif menurut **Sugiyono (2005 : 21)**. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut **Sarwono (2006 : 28)** mengatakan bahwa : penelitian kualitatif bertujuan membuat pencandraan/lukisan /deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti.

C. Sampel Sumber Data

Menurut **Moleong (2010 : 224)**, yang dimaksud dengan sampling dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama, menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan konstruksinya. Sedangkan yang kedua adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling*, yaitu semua elemen dalam populasi tidak

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Ferdinand, 2006:231). Metode pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling*, Teknik penentuan sampel berdasarkan ketentuan, yaitu siapa yang memang sengaja telah menggunakan jasa pelayanan KUR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Wamena dan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika dipandang tepat. Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah :

1. 1 (satu) orang Micro Banking Manager (MBM) Bank Mandiri Cabang Wamena
2. 1 (satu) orang Micro Kredit Analis (MKA) Bank Mandiri Cabang Wamena
3. 1 (satu) orang Micro Kredit Sales (MKS) Bank Mandiri Wamena
4. 3 (tiga) orang nasabah yang telah menerima Kredit Usaha Rakyat

D. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif peneliti akan lebih banyak menjadi instrument, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan key instrument (Sugiyono, 2013 : 105).

Sebagai instrument kunci dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi, partisipasi dan wawancara secara mendalam dilapangan dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian dan tidak keluar dari substansi-substansi penelitian yang dimaksud. Ditambah dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai pendukung. Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini adalah :

1. Pedoman Wawancara yang berisikan pertanyaan – pertanyaan yang ditujukan kepada informan.
2. Menyiapkan alat tulis, untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan yang di wawancarai.

3. Menyiapkan kamera untuk mengambil gambar pada saat interview dengan informan yang dianggap tahu masalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*library reseach*).

Penelitian pustakayaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku buku literatur, diktat–diktat, bahan kuliah, Peraturan-Peraturan, Undang-Undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.

2. Pengamatan Partisipasi (*Participant Observation*)

Soetrisno dalam Sugiyono (2008:166), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Atau dapat dikatakan bahwa pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat atau peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara Mendalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur yakni wawancara dilakukan di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Esterberg dalam Sugiyono (2010 : 233)).

4. Dokumen

Menurut Louis Gottschalk (1986:38), mengemukakan bahwa dokumen dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologi.
- b. Dokumen diperuntukkan untuk surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah dan konsesi.
- c. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.

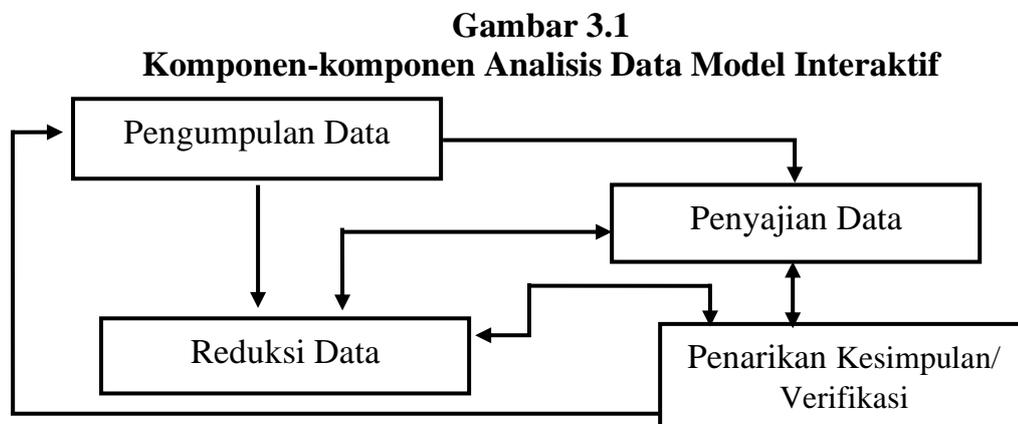
5. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2016 : 241) bahwa “ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kembali kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber”. Ini yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Sugiyono (2016:241) :

- a. Triangulasi Teknik : Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
- b. Triangulasi Sumber : berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berikut ini adalah komponen-komponen analisis data :



Sumber : Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:91),

Dalam analisis data kualitatif, Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:91), dilakukan secara :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan;

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;

3. Verifikasi Data (*Data Verification*).

Merupakan kegiatan analisis terakhir dengan mengambil kesimpulan dari data- data yang diperoleh peneliti.

Jadi ketiga komponen tersebut sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam

bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut” analisis”.

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2016 : 241), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

a) Sejarah

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

Sebelum berdirinya Bank Mandiri di Wamena Kabupaten Jayawijaya, sebelumnya Bank Mandiri bernama Bank Eksim Wamena yang pada saat itu di pimpin oleh Bapak Joko Wiryono sebagai Kepala Cabang yang mana jumlah pegawai pada saat itu sebanyak 10 orang. Produk pelayanan pada saat itu mencakup setoran, deposito, tabanas (tabungan nasional) dan kredit modal kerja. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1998 sebanyak 4 bank pemerintah melakukan merger yang hasil penggabungannya bernama Bank Mandiri Cabang Wamena. Saat ini pegawai di Bank Mandiri sebanyak 36 orang (*narasumber : Iwik Sriyoto, Pegawai Bank Mandiri Wamena*).

b) Letak Geografis

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Wamena secara geografis terletak di 3°58'57"S 138°38'35"E (*Sumber Google Earth*). Jarak antara P.T Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Wamena dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya ± 1 Km.P.T Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Wamena

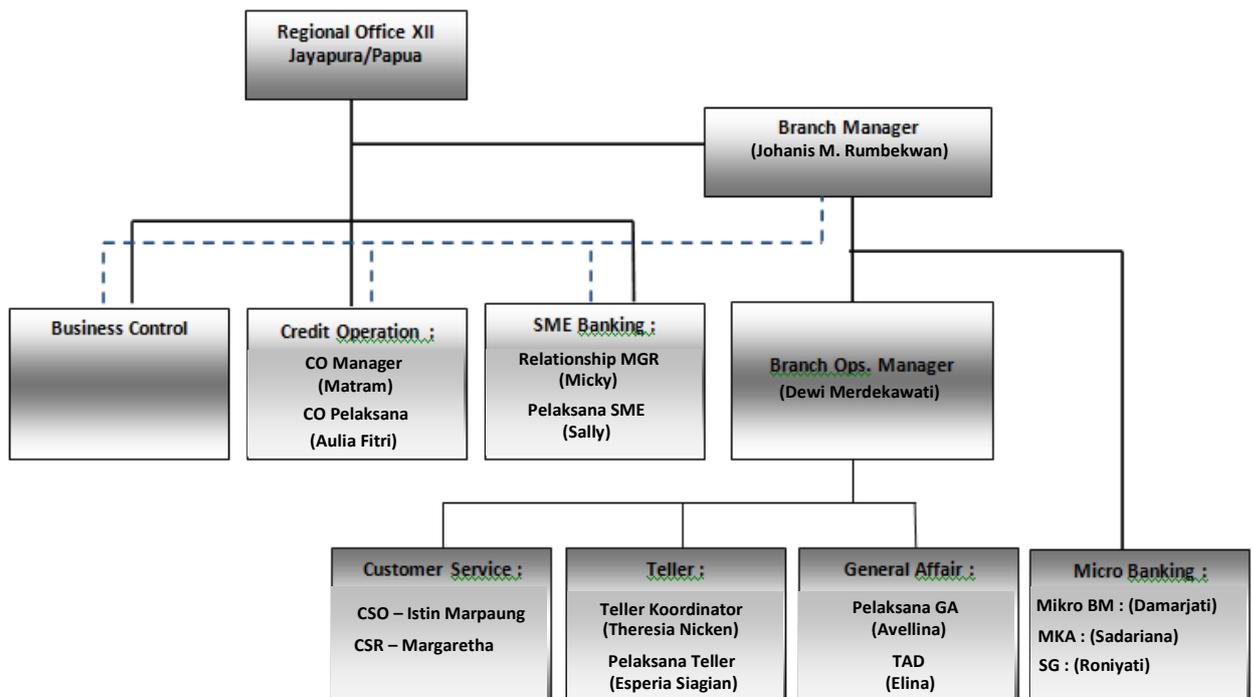
beralamatkan di Jalan Trikora No 92 Kabupaten Jayawijaya Wamena 99511, Papua

Gambar 4.1
Kantor P.T Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Wamena.



c) Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT Bank Mandiri Cabang Wamena



d) Tugas Pokok dan Fungsi

1) Branch Manager

- Ringkasan Pekerjaan (*Job Summary*)
 - a. Mengelola operasional cabang, menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, *sales* dan *service* untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non-fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang.
 - b. Mengawasi kegiatan seluruh SBU Floor/Desk, Supporting Floor/Desk, serta unit kerja lain untuk mencapai dan meningkatkan *market share* dana dan kredit, volume bisnis/transaksi serta kualitas operasional yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan target yang telah ditentukan bersama dengan Area Manager.
- Tanggung Jawab Utama
 - a. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (*corporate image*).
 - b. Mengupayakan agar cabang yang dikelola menjadi *market leader* di daerah.
 - c. Memacu percepatan penjualan dan pencapaian target bisnis dan *market share*.
 - d. Memastikan tingkat pelayanan di Cabang telah sesuai standar pelayanan yang ditentukan Bank Mandiri.
 - e. Memastikan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA).
 - f. Mengelola hubungan baik dengan seluruh *stakeholder* Bank Mandiri (Pemerintah Daerah, Otoritas dan Asosiasi Perbankan Daerah, Serikat Pekerja (SPBM), Anak Perusahaan & Dana Pensiun, dll).

- g. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan mengefektifkan fungsi internal control di cabang.
 - h. Meningkatkan product holding dalam rangka customer retention.
 - i. Melaksanakan fungsi koordinator kliring dan *pooling* kas BI bagi cabang yang ditunjuk secara khusus.
 - j. Meningkatkan produktifitas pegawai, dengan Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi pegawai dengan memberikan contoh yang baik di segala bidang (role model).
 - k. Mengelola dan mengembangkan personel cabang secara optimal dengan melakukan penilaian kerja, pembinaan pegawainya.
 - l. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan atasan sesuai dengan fungsi jabatannya.
 - o Wewenang
 - a. Mewakili Bank Mandiri di area kerja cabangnya untuk berhubungan dengan *stakeholder* (antara lain Pemerintah Daerah, Otoritas dan Asosiasi Perbankan Daerah, Serikat Pekerja, Anak Perusahaan dan Dana Pensiun).
 - b. Mengusulkan pembebanan biaya seluruh SBU terkait, biaya pengelolaan relationship nasabah SBU dan biaya pengelolaan asset/aktiva di Areanya.
- 2) Branch Operation Manager
- o Ringkasan Pekerjaan
Mengelola operasional cabang dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dalam rangka meningkatkan profit .

- Tanggungjawab Utama
 - a. Memastikan kualitas pelayanan kepada nasabah telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
 - b. Membangun relationship dengan nasabah dalam rangka mendukung pencapaian target branch.
 - c. Memastikan operasional cabang berjalan dengan lancar dan memenuhi standar SLA
 - d. Mendukung pencapaian target liabilities dan feebased income unit bisnis di area
 - e. Melakukan supervisi fungsi-fungsi yang ada dibawahnya yang meliputi : transaksi cabang, general affairs, cash & clearing operations dan e-channel operations
 - f. Memastikan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan Standard Procedure Operational (SPO) serta mengoptimalkan fungsi internal control di cabang.
 - g. Memastikan pengembangan pegawai, peningkatan produktifitas pegawai, customer & product knowledge kepada pegawai dibawah supervisinya
 - h. Melakukan review dan menetapkan ukuran kinerja dan sasaran-sasaran tahunan seluruh bawahan langsung
- Wewenang
 - 1) Kewenangan terkait *operation & support* sesuai ketentuan kewenangan yang berlaku
 - 2) Menandatangani dokumen yang menjadi kewenangannya
 - 3) Merekomendasikan hasil penilaian kinerja pegawai pimpinan dan pelaksana dibawah supervisinya

3) Customer Service Officer (CSO)

○ Ringkasan Pekerjaan

Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non-fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas Cabang serta pelaksanaan internal control.

○ Tanggungjawab Utama

- a. Melaksanakan aktivitas marketing produk dan jasa-jasa perbankan, investasi dan bancassurance kepada Nasabah/calon Nasabah potensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Melaksanakan *cross selling* atas produk-produk Bank Mandiri kepada Nasabah dalam meningkatkan *product holding* Nasabah
- c. Mengelola dan memperbaharui CIF sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis perbankan.
- d. Memastikan dan melaksanakan pelayanan Cabang telah sesuai dengan Standar Service Excellence
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip KYC dan internal control.
- f. Melaksanakan dan mengoptimalkan CRM sebagai alat *cross selling* dan handling complaint
- g. Meningkatkan dana *Low Cost Deposit* dan perolehan *Fee Based Income* melalui retail transaction dengan fokus kepada pedagang dan pebisnis.
- h. Menjaga kerahasiaan *password* milik sendiri dan tidak melakukan sharing *password* dengan pegawai lainnya
- i. Melaksanakan action plan yang efektif sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.
- j. Menindaklanjuti program aliansi a.l. dengan cara melakukan pendekatan terhadap pemilik dan pengurus

perusahaan, rekanan atau debitur untuk meningkatkan dana *Low Cost Fund*.

- k. Meningkatkan aktifitas transaksi Nasabah melalui e-Channel Mandiri.
 - l. Memastikan terlaksananya kontinuitas kerja dan operasional Cabang dengan baik sesuai dengan SLA, Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis.
 - m. Memastikan terkait dengan penyelesaian outstanding penyelesaian *complain* Nasabah
 - o Wewenang
 - a. Memberi masukan perbaikan layanan kepada Customer Service Representative, Teller dan Security di Cabang.
 - b. Mewakili Branch Manager dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
 - c. Melaksanakan operasional sesuai dengan limit kewenangan pada buku Instruksi Internal dan Instruksi Operasional unit kerja
 - d. Memberikan usulan penyempurnaan buku pedoman, SE dan ketentuan lainnya ke Kantor Pusat.
 - e. Mengusulkan *special rate* untuk Nasabah tertentu
- 4) Teller
- o Ringkasan Pekerjaan

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahbukuan / penyetoran non tunai (rupiah dan valuta asing).
 - o Tanggungjawab Utama
 - A. Pengembangan Bisnis
 - 1. Memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada Nasabah sesuai “Standar Pelayanan Teller”.
 - 2. Menjaga kerapian dan kebersihan *Counter Teller*

3. Mendukung / ikut serta melaksanakan *cross selling* atas produk-produk Bank Mandiri.
4. Menampung usul/saran Nasabah dan menyampaikannya kepada atasan.

B. Kegiatan Operasional

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan, Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
2. Memproses / melaksanakan transaksi tunai dan non tunai termasuk warkatwarkat sesuai batas wewenangnya.
3. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai/bank notes dan warkat berharga
4. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi.
5. Melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar.
6. Menjamin kerahasiaan *password* milik sendiri dan tidak melakukan *sharing password* dengan pegawai lainnya.
7. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pemakaian terminal komputer.
8. Melaksanakan penukaran uang lusuh ke Cabang Koordinator/*Pooling cash*/Bank Indonesia.
9. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan Nasabah.
10. Menjaga kerapian dan kebersihan Counter Teller.
11. Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaan Outlet.
12. Melakukan verifikasi antara voucher dengan validasi dan laporan transaksi Teller.
13. Meyakini keaslian dan keabsahan specimen tanda tangan Nasabah pada warkat bank dan form transaksi penarikan antar Cabang.

14. Memeriksa identitas Nasabah dengan benar.
15. Menjamin keamanan boks Teller dan kewenangan memegang kunci boks.
16. Melakukan verifikasi dan menandatangani warkat transaksi.
17. Melaksanakan pengambilan dan pengantaran uang ke Cabang Koordinator/ *Pooling Cash* atau Nasabah.
18. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan atasan sesuai dengan fungsi jabatannya

5) Customer Service Representatif

- Ringkasan Pekerjaan
 - a. Melaksanakan fungsi pemasaran dan promosi produk dan jasa Bank Mandiri.
 - b. Melaksanakan pelayanan di *front office* sesuai standar yang ditentukan Bank Mandiri.
- Tanggungjawab Utama
 - A. Pengembangan Bisnis
 1. Melaksanakan *cross selling* atas produk-produk Bank Mandiri kepada Nasabah eksisting.
 2. Pelaksanakan pemasaran dan promosi produk dan jasa Bank Mandiri, antara lain:
 - a. Menjual dan mempromosikan produk retail, melalui :
 - Secara proaktif memberikan informasi dan menawarkan produk dan jasa serta transaksi Bank Mandiri kepada Nasabah.
 - Menyarankan kepada Nasabah untuk memanfaatkan produk dan jasa Bank Mandiri lainnya.
 - Memberikan brosur-brosur Produk dan Jasa Bank Mandiri
 - Membantu dan mengantar Nasabah ke petugas lainnya.

- Membantu Nasabah dalam pengisian formulir transaksi.
- Memelihara Nasabah lama dan mencari Nasabah baru yang potensial.

b. Pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan rekening seluruh produk dana, antara lain:

- Menerima permohonan pembukaan dan penutupan rekening Giro, Tabungan, Deposito berjangka, sertifikat Deposito.
 - Menerima permohonan dan memproses pelayanan jasa-jasa retail lainnya antara lain Safe Deposit Box, Kartu ATM Mandiri, Payment Point.
 - Memasukkan data Nasabah ke dalam komputer.
 - Memeriksa keabsahan dokumen antara lain : Kartu Identitas, Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, TDP.
 - Meneruskan permohonan Nasabah ke CSO untuk diverifikasi.
1. Mengelola database Nasabah sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis perbankan.
 2. Menerima dan meneruskan permohonan consumer loan\
 3. Memberikan informasi / penjelasan produk dan jasa lainnya kepada Nasabah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
 4. Menangani keluhan / komplain Nasabah.

B. Kegiatan Operasional

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Operasional Cabang sesuai dengan Standar Prosedur, Petunjuk Teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pelayanan kepada Nasabah sesuai standar pelayanan yang ditentukan Bank Mandiri.

3. Membuat data base Nasabah / update dan mengadministrasikannya dengan tertib.
4. Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pengelolaan surat-surat berharga dengan baik sesuai dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pencatatan administrasi terhadap surat-surat berharga yang diterima dari kantor pusat, posisi persediaan yang ada dan surat-surat berharga yang diberikan kepada Nasabah
 - b. Mengadministrasikan dengan tertib surat tanda terima/resi cek/Bilyet Giro yang diterima dari Nasabah.
5. Memberikan pelayanan rekening, antara lain :
 - a) Informasi saldo
 - b) Permintaan Rekening Koran
 - c) Permintaan buku Cek/BG
 - d) Informasi mutasi rekening
 - e) Status transfer
 - f) Standing Order
6. Memberikan informasi / penjelasan produk dan jasa lainnya kepada Nasabah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan transaksi trade services sesuai standar prosedur dan kualitas yang ditetapkan.
8. Mengadministrasikan, mengencode dan menginput data buku Cek/BG.
9. Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan Nasabah, antara lain :
 - a) Memecahkan keluhan dan kesulitan Nasabah secara cepat, dan pastikan bahwa Nasabah puas.
 - b) Membuat surat jawaban/tanggapan kepada Nasabah, dan diteruskan ke CSO.

- c) Melakukan diskusi dengan CSO untuk keluhan yang dianggap sulit.
 - d) Menginformasikan jenis keluhan Nasabah yang sering terjadi kepada CSO.
 - e) Mengajak Nasabah yang menyampaikan keluhan yang dianggap sulit ke Private Room.
10. Melaksanakan tugas-tugas administrasi Customer Service, antara lain :
- a) Membantu CSO menyelesaikan tugas-tugas administrasi.
 - b) Membuat laporan-laporan dan meneruskannya ke CSO.
 - c) Menyiapkan formulir-formulir transaksi di counter.
11. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh CSO.
12. Melaksanakan input data ke dalam komputer dengan benar.
13. Bertanggung jawab atas kerahasiaan *password* milik sendiri dan tidak melakukan *sharing password* dengan pegawai lainnya.
14. Mengadministrasikan surat-surat berharga dan dokumen lainnya sesuai ketentuan
- e) Sumber Daya Manusia

Kondisi institusi sangat dipengaruhi dan tergantung pada Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Adapun tabel jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2	1	2,94
2	S1	20	58,82
3	D3	1	2,94
4	SMA	12	35,29
Jumlah		34	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang S2 sebesar 2,94 %, S1 58, 82 %, D3 2,94 % dan SMA 35, 29 % .

Tabel 4.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	BM	1	2,94
2	BOM	1	2,94
3	CSO	2	5,88
4	CSA	1	2,94
5	CSR	2	5,88
6	TELKO	1	2,94
7	TELLER	3	8,82
8	BBC	1	2,94
9	GA	1	2,94
10	MBM	1	2,94
11	BSS	1	2,94
12	MKA	1	2,94
13	MKS	3	8,82
14	CO MANAGGER	1	2,94
15	CO	2	5,88
16	RM	1	2,94
17	ARM	1	2,94
18	SECURITY	4	11,76
19	DRIVER	2	5,88
20	SORTIR	2	5,88
21	PRAMUBHAKTI	3	8,82
Jumlah		35	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jabatan BM 1 orang, BOM 1 orang, CSO 2 orang, CSA 1 orang, CSR 2 orang, TELKO 1 orang, TELLER 1 orang, BBC 1 orang, GA 1 orang, MBM 1 orang, BSS 1 orang, MKA 1 orang, MKS 3 orang, CO Managger 1 orang, CO 2 orang, RM 1 orang, ARM, 1 orang, SECURITY 4 orang, Driver 2 orang, SORTIR 2 orang dan PRAMUBHAKTI 3 orang dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 35 orang.

2. Keadaan Informan

Tabel 4.3
Keadaa Informan Berdasarkan Status/Jabatan

No	Status/Jabatan	Frekuensi	(%)
1	Mikro Banking Manager	1	16,67
2	Mikro Kredit Analis	1	16,67
3	Mikro Kredit Sales	1	16,67
4	Nasabah/Wiraswasta	2	33,33
5	Nasabah/IRT	1	16,67
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan informan berdasarkan jabatan yaitu 1 orang MBM, 1 orang MKA, 1 orang MKS, 2 orang Nasabah/Wiraswasta dan 1 orang Nasabah/Ibu Rumah Tangga. Jadi jumlah keseluruhan informan 6 orang.

Tabel 4.4
Keadaa Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	(%)
1	S1	2	33,33
2	D3	2	33,33
3	SMA	1	16,67
4	SMP	1	16,67
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan informan berdasarkan pendidikan S1 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 2 orang, SMA 1 orang, SMP 1 orang.

Tabel 4.5
Keadaa Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	(%)
1	Laki – Laki	2	33,33
2	Perempuan	4	66,67
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan informan berdasarkan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 2 orang, Perempuan sebanyak 4 orang.

Tabel 4.6
Keadaa Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	(%)
1	25-35	5	83,33
2	36-45	0	0
3	46-55	1	16,67
Jumlah		6	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan informan berdasarkan usia 25-35 sebanyak 5 orang,36-45 sebanyak 0 orang,46-55 sebanyak 1 orang.

3. Analisis Data

a) Komunikasi

Apakah program KUR sudah disosialisasikan kepada masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena menyampaikan bahwa :

“Iya kita sudah sosialisasikan selama ini”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Iya sudah ibu”

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Sudah”

Bagaimana cara pihak bank mensosialisasikan program KUR kepada masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena menyampaikan bahwa :

“Iya biasa kita kunjungan ke pengusaha – pengusaha ke kios – kios untuk memberikan brosur dan tabel angsuran”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Sales kami pergi marketing bagi – bagi brosur”

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Tentu saja dari kami kan ikut memasarkan, biasa melalui brosur atau melalui agen branchles, jadi dari situ kita memberitahukan kepada masyarakat adanya program usaha rakyat dari pemerintah”

Apa saja yang biasa dikomunikasikan kepada nasabah dan sesering apa program KUR ini di informasikan ke nasabah ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa :

“Biasa kita komunikasikan itu bunga, persyaratan supaya masyarakat mengerti. Kalau ada program KUR dari pemerintah kita sosialisasikan ke nasabah, kadang satu tahun dua kali, jadi kalau ada bunga promo kita langsung kita infokan ke nasabah”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Setiap waktu mereka bagi brosur mereka menjeaskan bunga KUR itu murah dan diambil masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Jadi yang biasa kami informasikan adalah bahwa KUR ini adalah program pemerintah dengan bunga yang cukup murah dengan tujuan untuk pertumbuhan pengusaha di negeri, untuk kami informasikan sih hampir setiap hari kami lakukan pemasaran program KUR ini”

Kemudahan dalam hal komunikasi yang dilakukan implementor kepada nasabah dengan pertanyaan yang diajukan kepada nasabah **Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas Bank Mandiri mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik kepada Bapak/Ibu ?**

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 4** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Pattimura menyampaikan bahwa :

“Iya sudah baik”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 5** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Putikellek menyampaikan bahwa :

“Yaa selama ini baik-baik saja”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 6** pada hari Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Hom – Hom Muai menyampaikan bahwa :

“Yaa sudah baik”

Apa saja yang biasa dikomunikasikan dengan nasabah ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 4** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Pattimura menyampaikan bahwa :

“Biasanya petugasnya menyampaikan persyaratan-persyaratan apa saja yang kita lengkapi terus masalah bunga KUR,jaminan,itu saja sih”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 5** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Putikellek menyampaikan bahwa :

“Mereka selalu pergi menawarkan kita yaa kami menanggapi dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 6** pada hari Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Hom – Hom Muai menyampaikan bahwa :

“Biasanya petugasnya sampaikan persyaratannya apa saja yang kita lengkapi terus masalah bunga KUR, jaminan”

Dari urian data tentang indikator komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa ;

1. Program Kredit Usaha Rakyat telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara membagikan brosur – brosur melalui agen branches;
2. Yang biasa dikomunikasikan oleh implementor tentang program KUR ini adalah tentang bunga yang cukup murah, persyaratan, jaminan dan apabila ada promo juga disosialisasikan;
3. Komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada nasabah sudah cukup baik.

b) Sumber Daya

Berapa orang yang bertugas mengurus program KUR di Bank Mandiri dan apakah SDM yang bekerja mengurus KUR sudah sesuai dengan kompetensi ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Marketing ada 4 orang, 1 bagian proses dikantor. Sudah, karena pegawai sebelum bekerja itu ditrainingkan supaya mengerti apa yang mau dipasarkan”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Ada 3 orang, Sudah sesuai”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Kalau dari bank mandiri wamena ada 3 yang memang untuk mengurus KUR tapi secara keseluruhan seluruh pegawai ikut membantu pemasaran KUR” Untuk kompetensi kami sudah cukup memadai dengan pengetahuan produk KUR yang cukup bagus”

Apakah petugas – petugas yang bekerja sudah memahami tentang program KUR dan sudah melaksanakan tugas dengan baik ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Iya sudah, kan kalau dia tidak memahami kan tidak tau memasarkan”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Iya mereka sudah memahami”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Untuk pemahaman tentang program KUR sudah sangat baik pelaksanaan tugas juga sudah sangat baik”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 4** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Pattimura menyampaikan bahwa :

“Iya yang saya lihat sih mereka sudah paham karena sudah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dengan yang kita jalani sekarang”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 5** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Putikellek menyampaikan bahwa :

“Selama ini iya”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 6** pada hari Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Hom – Hom Muai menyampaikan bahwa :

“Iya yang saya lihat sih mereka sudah paham karena sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ke kita”

Berapa alokasi dana KUR per tahun di Bank Mandiri ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Alokasinya itu sekitar 34 triliun, itu pertahun seluruh Indonesia dan itu dari pemerintah langsung”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Bukan di bank mandiri tapi dibagikan diseluruh Bank itu 34 triliun itu tidak ditargetkan disetaip bank, jadi siapa cepat dia dapat”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Kalau di bank mandiri kalau kita hitungannya satu ini yaah dari pemerintah mengalokasikan 34 triliun nanti dibagi ke empat bank pemerintah BUMN itu nanti kita siapa cepat gitu jadi berapapun selama belum mencapai kuota tersebut kita bisa salurkan”.

Apakah dana KUR yang disalurkan kepada nasabah sesuai dengan permintaan nasabah ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Ya kita salurkan sesuai dengan permintaan nasabah, sesuai kebutuhannya, nanti kalau proses tidak sesuai nanti masalah. Kita lihat juga usahanya dengan jaminannya, kita sesuaikan dengan hasil penjualannya setiap hari”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Ya sesuai, kita Tanya tergantung kemampuan nasabah mengangsurnya. Kita Tanya penghasian mereka perhari berapa dan kalau dia mampu bayar satu juta ya kita terima”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Itu kita analisa kembali terkait dengan usaha nasabah juga dengan kemampuan membayar nasabah jadi belum tentu yang diminta nasabah kita penuhi kita ada analisa tersendiri”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 4** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Pattimura menyampaikan bahwa :

“Iya sudah sesuai”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 5** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Putikellek menyampaikan bahwa :

“Iya sesuai dengan permintaan kita”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 6** pada hari Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Hom – Hom Muai menyampaikan bahwa :

“Yaa sudah sesuai”

Berdasarkan uraian data tentang indikator sumber daya dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 3 orang yang bertugas untuk mengimplementasikan program KUR dan Sumber Daya Manusia yang ada sudah memahami dengan baik program KUR

2. Pemerintah mengalokasikan dana KUR untuk tahun 2020 sebesar 34 Triliun rupiah yang dibagi ke Bank BUMN. Dan sistem kreditnya tergantung permintaan dari masyarakat.
3. Dana KUR yang dialokasikan sesuai dengan permintaan nasabah.

c) Disposisi

Bagaimana komitmen pegawai terhadap waktu bekerja, apakah pegawai sudah disiplin ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Ya sebagian disiplin, sebagian tidak , ya seperti terlambat dikantor”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Mereka disiplin, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Pegawai sudah disiplin untuk berangkat kerja dan pulang kerja bahkan untuk pulang kerja mungkin agak lembur sedikit seringnya”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 4** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Pattimura menyampaikan bahwa :

“Iya karena biasanya kita titip setoran dan itu ada bukti slip setorannya”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 5** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Putikellek menyampaikan bahwa :

“Iya selalu datang menawarkan kita dan survey dengan tepat waktu”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 6** pada hari Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Hom – Hom Muai menyampaikan bahwa :

“Setau saya jujur karena biasanya kita titip setoran dan mereka yang jemput dan langsung di setor”

Sejauh mana pelayanan yang diberikan petugas apabila nasabah mendapatkan masalah – masalah ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **infoman 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Kita kasih solusi tentang kendala yang dihadapi”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **infoman 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Mereka layani dengan baik, menyelesaikan masalah nasabah dengan baik juga, kalau tidak mengerti mereka selesaikan ke atasan”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Untuk petugas sudah sangat pro aktif kepada nasabah yang mempunyai masalah, jika memang belum bisa di tangani sendiri kita eskalasikan ke atasan”

Dari uraian data diatas tentang indikator disposisi dapat disimpulkan bahwa :

1. Pegawai sudah mempunyai komitmen terhadap waktu, disiplin dan jujur dalam menjalankan tugasnya melaksanakan program KUR di Bank Mandiri Cabang Wamena;
2. Pegawai selalu pro aktif melayani dan memberikan solusi apabila nasabah mengalami masalah – masalah dalam pelaksanaan program KUR di Bank Mandiri Cabang Wamena

d) Struktur Birokrasi

Apakah prosedur yang berlakukan Bank Mandiri sudah sesuai dengan Peraturan tentang Penyaluran KUR (Permenko Nomor 8 Tahun 2019) ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **infoman 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Ya selama ini sesuai dengan aturan”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **infoman 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Iya sudah sesuai, sudah”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Sudah sangat sesuai”

Apakah struktur birokrasi di Unit Mikro ini sudah efektif untuk melaksanakan program KUR ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **infoman 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Iya sudah”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **infoman 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Iya sudah”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Sudah sangat efektif untuk pelaksanaan program KUR”

Menurut ibu apakah prosedur mengurus kredit usaha rakyat ini sudah mudah atau masih berbelit-belit ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 4** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Pattimura menyampaikan bahwa :

“Mudah saja Karena kita tinggal kumpulkan berkas terus petugasnya yang datang ambil kerumah”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 5** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Putikellek menyampaikan bahwa :

“Selama ini sih mudah karena berjalan dengan lancar”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 6** pada hari Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Hom – Hom Muai menyampaikan bahwa :

“Mudah saja sih Karena kita tinggal kumpulkan berkas terus petugasnya yang datang ambil kerumah”

Dari uraian data tentang indikator struktur organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi KUR pada Bank Mandiri sudah sesuai dengan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019;
2. Struktur birokrasi pada Unit Mikro sebagai unit teknis yang menangani program KUR sudah efektif dan nasabah sudah dengan mudah mengurus KUR .

e) Faktor – Faktor Penghambat Implementasi KUR

Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program KUR ini ?

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 1** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Cabang Wamena, menyampaikan bahwa ;

“Hambatannya itu jaminan dari nasabah, surat keterangan usahanya, jaminannya tahun lama misalnya BPKB”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 2** pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Kalau di bank mandiri ada, contohnya jaminan, jaminian itu harus milik sendiri, tahunnya harus kita lihat lagi karena kalau ibarat kendaraan kan semakin tua kan harganya semakin harganya menurun. Kalau sertifikat itu harus milik sendiri atau pihak kedua.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Untuk hambatan ini kan kalau kur memang tidak sembarang yang bisa dapat dengan prosedurnya itu belum ada pinjaman produktif satupun dan misalkan ada pinjaman konsumtif itu harus lancar, nah untuk hambatannya biasanya pemahaman masyarakat mengenai kolektibilitas itu masih sangat rendah jadi kita harus benar-benar selektif untuk mencari nasabah atau calon debitur yang lancar dan untuk jaminan memang untuk KUR dibawah 50 juta itu jaminan hanya untuk jaminan tambahan tapi untuk di atas itu sampai 200 di bank mandiri harus benar-benar komplai dengan aturan yaitu misalkan bpkb atau sertipikat harus atas nama sendiri atau satu derajat bpkb itu harus atas nama sendiri dan satu derajat juga dengan tahun pembuatan tidak lebih dari delapan tahun pada saat produk KUR ini lunas”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 4** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Pattimura menyampaikan bahwa :

“kemarin saya pernah mau pengajuan pas sudah lunas tapi ternyata tidak bisa karena saya punya bpkb motor ini katanya sudah tidak memenuhi kriteria”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 5** pada Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Putikellek menyampaikan bahwa :

“Kalau menurut saya selama ini belum ada hambatan tapi tidak tau nantinya”

Berdasarkan hasil wawancara kepada **informan 6** pada hari Sabtu, 11 September 2020 bertempat di Jl. Hom – Hom Muai menyampaikan bahwa :

“Kalau saya kemarin kendala di jaminan saya mau pengajuan yang lebih besar tapi harus pake sertifikat tanah sedangkan kita di wamena ini cumin kontrak,tidak ada aset,padahal kita sudah lancar memabayar angsuran,petugasnya juga sudah lihat kita punya usaha ini lumayan lancar pembelinya”.

Dari uraian data tentang faktor penghambat diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi KUR ini adalah Jaminan yang diberikan debitur seringkali bermasalah sehingga pihak Bank hanya memberikan dana KUR kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

B. Pembahasan

a) Komunikasi

Menurut Edward III dalam **(Subarsono, 2011: 90-92)** Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang indikator komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa ;

1. Program Kredit Usaha Rakyat telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara membagikan brosur – brosur melalui agen branchles;
2. Yang biasa dikomunikasikan oleh implementor tentang program KUR ini adalah tentang bunga yang cukup murah, persyaratan, jaminan dan apabila ada promo juga disosialisasikan;
3. Komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada nasabah sudah cukup baik.

b) Sumber Daya

Menurut Edward III dalam **(Subarsono, 2011: 90-92)** Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang indikator sumber daya dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 3 orang yang bertugas untuk mengimplementasikan program KUR dan Sumber Daya Manusia yang ada sudah memahami dengan baik program KUR
2. Pemerintah mengalokasikan dana KUR untuk tahun 2020 sebesar 34 Triliun rupiah yang dibagi ke Bank BUMN. Dan sistem kreditnya tergantung permintaan dari masyarakat.
3. Dana KUR yang dialokasikan sesuai dengan permintaan nasabah.

c) Disposisi

Menurut Edward III dalam **(Subarsono, 2011: 90-92)** Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang indikator disposisi dapat disimpulkan bahwa :

1. Pegawai sudah mempunyai komitmen terhadap waktu, disiplin dan jujur dalam menjalankan tugasnya melaksanakan program KUR di Bank Mandiri Cabang Wamena;
2. Pegawai selalu pro aktif melayani dan memberikan solusi apabila nasabah mengalami masalah – masalah dalam pelaksanaan program KUR di Bank Mandiri Cabang Wamena

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi KUR pada Bank Mandiri sudah sesuai dengan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019;

2. Struktur birokrasi pada Unit Mikro sebagai unit teknis yang menangani program KUR sudah efektif dan nasabah sudah dengan mudah mengurus KUR

e) Faktor Penghambat

Dari uraian data tentang faktor penghambat diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi KUR ini adalah Jaminan yang diberikan debitur seringkali bermasalah sehingga pihak Bank hanya memberikan dana KUR kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Sebagaimana hasil wawancara kepada **informan 3** pada Kamis, 10 September 2020 bertempat di Bank Mandiri Wamena menyampaikan bahwa :

“Untuk hambatan ini kan kalau kur memang tidak sembarang yang bisa dapat dengan prosedurnya itu belum ada pinjaman produktif satupun dan misalkan ada pinjaman konsumtif itu harus lancar, nah untuk hambatannya biasanya pemahaman masyarakat mengenai kolektibilitas itu masih sangat rendah jadi kita harus benar-benar selektif untuk mencari nasabah atau calon debitur yang lancar dan untuk jaminan memang untuk KUR dibawah 50 juta itu jaminan hanya untuk jaminan tambahan tapi untuk di atas itu sampai 200 di bank mandiri harus benar-benar komplai dengan aturan yaitu misalkan bpkb atau sertipikat harus atas nama sendiri atau satu derajat bpkb itu harus atas nama sendiri dan satu derajat juga dengan tahun pembuatan tidak lebih dari delapan tahun pada saat produk KUR ini lunas”

f) Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Cabang Wamena adalah sebagai berikut :

a) Dari segi Sumber Daya Manusia yang ada sudah memahami dengan baik program KUR dan Dana KUR yang dialokasikan sesuai dengan permintaan nasabah serta pegawai sudah mempunyai komitmen terhadap waktu, disiplin dan jujur dalam menjalankan tugasnya melaksanakan program KUR di Bank Mandiri Cabang Wamena;

- b) Dari segi struktur birokrasi pada Unit Mikro sebagai unit teknis yang menangani program KUR sudah efektif dan nasabah sudah dengan mudah mengurus KUR .
- c) Fasilitas yang diberikan kepada pegawai untuk memudahkan pegawai dalam menjalankan program Kredit Usaha Rakyat.
- d) Bunga kredit tidak membebani nasabah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Wamena sudah diimplementasikan dengan baik.

Hal ini kemudian dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa program KUR sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian Sumber Daya Manusia sudah sesuai dengan kompetensi dan memahami program KUR, Sumber Daya Finansial yang cukup dan dialokasikan sesuai dengan permintaan nasabah, Pegawai sudah mempunyai komitmen terhadap waktu, disiplin dan jujur serta selalu pro aktif memberikan solusi apabila nasabah mempunyai keluhan, kemudian implementasi sudah sesuai dengan peraturan menko perekonomian nomor 8 tahun 2019, struktur birokrasi yang efektif dan memudahkan masyarakat mengurus Kredit Usaha Rakyat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Wamena, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sosialisasi KUR kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan kompetensi pegawai agar lebih baik dalam melaksanakan program KUR;
- 3) Meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran pegawai dalam melaksanakan program KUR.
- 4) Meningkatkan pemahaman pegawai dan nasabah tentang Peraturan Menko Perekonomian Nomor : 8 Tahun 2019.



Wawancara Dengan Pegawai Mikro Kredit Sales Ibu Roniati Hutapea Di Bank Mandiri Cabang Wamena Ruangn Mikro



Wawancara Dengan Mikro Kredit Analis Ibu Sadariana Nababan Di Bank Mandiri Cabang Wamena Ruangn Mikro



Wawancara Dengan Mikro Banking Manager Bapak Damarjati Satya Gumelar Di Ban Mandiri Cabang Wamena Ruangn Mikro



Wawancara Dengan Nasabah Ibu Kasmiati Di Jln.Pattimura



Wawancara Dengan Nasabah Bapak H.Masse Di Jln.Putikelek



Wawancara Dengan Nasabah Ibu Vera Di Jln.Hom-Hom Moai

BIODATA PENULIS



Nama suci, nomor induk mahasiswa (NIM) 201611185. Lahir pada 14 oktober 1997 di taraweang,Sulawesi selatan. Orangtua rahmani dan indo upe. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 24 taraweang lulus tahun 2010, melanjutkan di SMP negeri 2 labakkang lulus tahun 2013 dan melanjutkan di SMA negeri 1 bungoro lulus tahun 2016.

Akhirnya dapat melanjutkan kuliah pada tahun 2016 di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UNAIM yapis wamena mengambil program studi administrasi publik (S1).